

TESIS

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
KUALITAS SISTEM INFORMASI DAERAH TERHADAP
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN KOMITMEN PIMPINAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

*The Effect of Human Resources' Competence and Information
System Quality on the Effectiveness of Regional Property
Management with Leadership Commitment as the Moderation
Variable in North Toraja Regency*

**YONATAL P. TABITA
A042191009**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
KUALITAS SISTEM INFORMASI DAERAH TERHADAP
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN KOMITMEN PIMPINAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

*The Effect of Human Resources' Competence and Information
System Quality on the Effectiveness of Regional Property
Management with Leadership Commitment as the Moderation
Variable in North Toraja Regency*

**YONATAL P. TABITA
A042191009**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS SISTEM INFORMASI DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN KOMITMEN PIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KABUPATEN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh

YONATAL P. TABITA
A042191009

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 30 Juli 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP: 196406091992031000

Pembimbing Pendamping,



Dr. Wardhani Hakim, S.E., M.Si
NIP: 197205251997022001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

TESIS

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS SISTEM INFORMASI DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN KOMITMEN PIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KABUPATEN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh :

YONATAL P. TABITA
A042191009

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 30 Juli 2021

Komisi Penasehat

Ketua



Prof. Dr. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP: 196406091992031000

Anggota



Dr. Wardhani Hakim, S.E., M.Si
NIP: 197205251997022001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan, Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP: 197106192000031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YONATAL P. TABITA

NIM : A042191009

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul :

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
KUALITAS SISTEM INFORMASI DAERAH TERHADAP
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN KOMITMEN PIMPINAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis saya ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Yonatal P.Tabita

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrahim.

Salam Sejahtera

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Proses penyelesaian tesis ini telah banyak melibatkan pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat serta saran yang sangat berarti kepada peneliti sehingga segala hambatan yang ditemui pada saat proses penyusunan tesis ini dapat diatasi oleh peneliti. Atas segala saran dan bantuan yang diberikan, dengan ketulusan hati peneliti mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Arifuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CRA.,CRP dan Dr. Wardhani Hakim, S.E.,M.Si, Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Terima kasih pula kepada Dr. Mursalim Nohong, SE.,M.Si. sebagai sebagai Ketua Program Studi Magister Keuangan Fakultas Eknomomi dan Bisnis yang telah ikut serta membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini
5. Dr. Kalatiku Paembonan, SE.,M.Si, Mantan Bupati Toraja Utara yang telah memberikan ijin dan dukungan kepada peneliti untuk melanjutkan

pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

6. Yohanis Bassang SE.,M.Si. Bupati Toraja Utara yang memberikan ijin kepada peneliti untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu tersayang Tabitha Tampang, Ayah tercinta Mesak Patasik, Istri tercinta Ludia Madaun dan Anak-anak tercinta Yolda Novita Patasik, Yolda Juliandri Patasik juga Yolda Agnes Trie Patasik, Yolda Lestari Patasik dan Yolda Caila Ramona Patasik yang telah menjadi motivasi terbesar saya untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Para sahabat yang telah memberikan dukungannya yang selalu setia memberikan semangat serta keluarga dan sahabat yang tak sempat saya sebutkan satu per satu namanya. Semoga dengan segala bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada saya bisa bernilai ibadah di sisi-Nya.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan peneliti terima dengan senang hati.

Makassar, Agustus 2021

YONATAL P. TABITA

ABSTRAK

YONATAL P. TABITA. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Sistem Informasi Daerah terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Toraja Utara (dibimbing oleh Arifuddin dan Wardhani Hakim).*

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan kualitas sistem informasi daerah terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah dengan komitmen pimpinan sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara serta menganalisis peran kualitas teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pejabat penatausahaan keuangan dan pengurus barang, serta pembantu pengurus barang. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif. Data dianalisis menggunakan dukungan SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah. Adapun, komitmen pimpinan memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah. Hasil yang diperoleh bahwa komitmen pimpinan tidak memoderasi, komitmen pimpinan memoderasi hubungan kualitas sistem informasi terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah, sedangkan komitmen pimpinan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah.

Kata kunci: sumber daya manusia, kualitas sistem informasi, kompetensi sumber daya manusia, komitmen pimpinan, efektivitas pengelolaan barang milik daerah



ABSTRACT

YONATAL P. TABITA. *The Effect of Human Resources' Competence and Information System Quality on the Effectiveness of Regional Property Management with Leadership Commitment as the Moderation Variable in North Toraja Regency* (supervised by **Arifuddin** and **Wardhani Hakim**)

The aims of this study are to test and analyze the effect of human resources' competency and the quality of regional information systems on the effectiveness of regional property management with leadership commitment as the moderation variable in the government of North Toraja Regency analyze the role of quality of information technology in moderation of the effect of bookkeeping, inventory, and reporting on the quality of financial statements of the government of North Toraja Regency.

This research was a quantitative study using primary data obtained using a questionnaire given to financial administration officials and goods management as well as officials of goods management. The sample was determined using purposive sampling technique and the data were analyzed using the SPSS approach.

The results show that human resources and the quality of information system affect the effectiveness of regional property management, while leadership commitment moderates the effect of human resources' competency regarding the effectiveness of regional property management in which the result shows that the commitment of leadership does not moderate; leadership commitment moderates the relationship between the quality of information system and the effectiveness of regional property management, while leadership commitment has an effect on the effectiveness of regional property management.

Keywords: human resources, the quality of information system, human resources' competency, leadership commitment, the effectiveness of regional property management



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2. Kegunaan Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1. Tinjauan Teoritis.....	21
2.1.1. Teori Pertanggungjawaban (<i>Stewardship Theory</i>)	10
2.1.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik	15
2.1.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia	18
2.1.4. Kualitas Sistem Informasi.....	19
2.1.5. Komitmen Pimpinan	21
2.1.6. Efektivitas Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah	24
2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	26

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	29
3.1. Kerangka Pemikiran.....	29
3.2. Hipotesis Penelitian.....	29
3.1.1. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis	30
3.1.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu	30
3.1.3. Pengembangan Hipotesis.....	33
3.1.3.1. Pengaruh Kualitas Sumber daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	33
3.1.3.2. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	34
3.1.3.3. Peran Komitmen Pimpinan Sebagai pemoderasi Hubungan Antara Kualitas Sumber daya Manusia dan Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	35
 BAB IV METODE PENELITIAN	 37
4.1. Rancangan Penelitian.....	37
4.2. Objek/Lokasi Penelitian	37
4.3. Populasi	37
4.4. Jenis dan Sumber Data	38
4.5. Teknik Pengumpulan Data	39
4.6. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel	39
4.6.1. Variabel Independen (Variabel Bebas).....	40
4.6.1.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia	40
4.6.1.2. Kualitas Sistem Informasi	41
4.6.2. Variabel Moderasi.....	42
4.6.2.1. Komitmen Pimpinan.....	42
4.6.3. Variabel Terikat	42
4.6.3.1. Efektivitas Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah	42
4.7. Teknik Analisis Data	45
4.7.1. Uji Kualitas Data	45

4.7.1.1. Uji Validitas	45
4.7.1.2. Uji Reabilitas.....	46
4.8. Analisis Statistik Deskriptip	46
4.8.1. Uji Asumsi Klasik.....	46
4.8.1.1. Uji Normalitas	46
4.8.1.2. Uji Multikolinearitas	47
4.8.1.3. Uji Heteroskedastisitas	47
4.8.2. Uji Hipotesis	48
4.8.3. Uji Signifikasi Individual (Uji Statistik T)	49
4.8.4. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)	50
4.8.5. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	51
BAB V HASIL PENELITIAN	52
5.1. Deskripsi Data	52
5.2. Statistik Deskriptif.....	53
5.3. Analisis Deskriptip Variabel	54
a. Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	56
i. Pengujian Validitas	56
ii. Pengujian Reliabilitas	58
b. Uji Asumsi Klasik	58
i. Uji Normalitas	58
ii. Uji Multikolinearitas.....	60
iii. Uji Heteroskedastisitas	61
5.4. Uji Hipotesis	62
5.5. Analisis Regresi tanpa Variabel Moderas	63
5.6. Analisis Regresi dengan Variabel Moderasi Komitmen Pimpinan.....	64
BAB VI PEMBAHASAN.....	70
6.1. Pengaruh Kualitas Sumberdaya manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	70

6.2. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektifitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	73
6.3. Peran Komitmen Pimpinan Sebagai Pemoderasi Hubungan antara Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	75
BAB VII PENUTUP.....	79
7.1. Kesimpulan.....	79
7.2. Implikasi	80
7.3. Keterbatasan Penelitian	81
7.4. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 - 2019	1
Tabel 4.2. Defenisi Operasinal dan Pengukuran Variabel	43
Tabel 5.1. Tingkat Pengembangan Kuesioner	52
Tabel 5.2. Karakteristik Responden Peneliti.....	53
Tabel 5.3 Descriptive Statistics	54
Tabel 5.4 Hasil Pengujian Validitas.....	57
Tabel 5.5 Hasil Pengujian Reliabilitas	59
Tabel 5.6 Hasi Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test	60
Tabel 5.7 Hasil Uji Multikolinearitas Coeficients ^a	60
Tabel 5.8 Hasil Uji Glejser.....	62
Tabel 5.9 Hasil Uji Regresi tanpa Variabel Moderasi	63
Tabel 5.10 Hasil Uji Regresi dengan Variabel Moderasi X3.....	64

DAFTAR GAMBAR

Nama Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 5.1 Defendand Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah adalah salah satu kegiatan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang sangat rumit penanganannya dan harus membutuhkan penanganan secara khusus.

Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilakukan secara profesional dalam kerangka tertib pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara manajerial, administratif maupun yuridis. Disisi lain, desentralisasi telah membawa tantangan bagi pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang demokratis dan mampu menyediakan dan melaksanakan terciptanya pelayanan yang jauh lebih baik bagi semua masyarakat yang ada. Perubahan positif tersebut perlu untuk didukung oleh para staf pemerintah Daerah, Legislatif, media lokal, dan masyarakat-masyarakat yang ada, dengan terlibat secara lebih aktif mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan.

Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah yang professional transparan, akuntabel, terukur, merupakan sebuah langkah yang harus di ambil

untuk bisa mengedepankan prinsip *Good Governace*. Pengelolaan barang Milik Daerah harus di kelola dengan berpatokan pada peraturan pemerintah yang sedang berlaku. Ketercapain pengelolaan barang, Milik daerah yang trasparan, akuntabel efektif telah diatur oleh pemerintah dalam peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yakni PP Nomor 28 tahun 2020 sebagai pengganti PP Nomor 27 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai yakni mengefektifkan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset barang milik daerah, melalui rekomendasi hasil temuan dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan provinsi Sulawesi selatan maka hal tersebut telah dicapai oleh kabupaten Toraja Utara yang dibuktikan melalui Laporan Keuangan Daerah yang memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) hal ini lah yang sangat memotivasi setiap daerah untuk belomba lomba untuk meraih predikat tersebut karena sangat mempengaruhi kredibilitas pemerintahan suatu daerah tertentu pada umumnya secara khususnya tidak terkecuali Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 1.1 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 - 2019

Tahun Laporan Keuangan	Opini Laporan Keungan
2015	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Wajar Tanpa Pengecualian
2019	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : Pemda Kab. Tana Toraja Utara (2020)

Raihan predikat opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara menggambarkan keseriusan berbenah dengan mereview dan memperbaiki penyajian Laporan Keuangan sehingga dapat meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Pertanggungjawaban atas BMD kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan Informasi BMD memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Kemampuan Kabupaten Toraja Utara dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK khususnya terkait dengan pengelolaan BMD sehingga dapat meraih opini WTP menjadi hal yang menarik untuk diteliti terkait faktor-faktor pendukung keberhasilan tersebut.

Dalam Teori Implementasi Kebijakan Publik (Edward III, 1980), terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implelementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bertolak dari teori tersebut, keberhasilan kebijakan publik dalam bentuk pengelolaan Barang Milik Daerah yang efektif dan efisien membutuhkan sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia yang berkompeten. Menurut Yusuf (2013) bahwa seorang pegawai pemerintah yang kompeten harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam hal ini aparatur daerah harus memiliki pengetahuan, kualitas, dan pemahaman yang

memadai tentang sistem pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut. Darno (2012) mendefinisikan kualitas sumber daya manusia sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya.

Lu (2011) menyimpulkan bahwa proses manajemen dipengaruhi oleh siklus hidup aset, strategi sumber daya manusia, teknologi informasi dan sumber daya, dan monitoring, integritas, dan transparansi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2013) bahwa pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya manusia dengan baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan aset daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan SKPD/UKPD.

Darno (2012) menambahkan bahwa dalam pekerjaan khususnya kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual lebih dominan dibandingkan pada kemampuan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Darno juga menemukan bukti adanya pengaruh positif variabel kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna. Begitu pula dengan hal senada yang diungkapkan oleh Tulungen (2014) bahwa tenaga kualifikasi yang

berkompeten dan berpengalaman dalam rangka pengadaan barang dan jasa mempengaruhi pengelolaan manajemen aset di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Haryanto (2013) menemukan bukti empiris adanya pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna. Namun Ashar (2013) menemukan hasil penelitian berbeda dimana Kualitas aparat daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen aset.

Sumber Daya yang juga penting untuk mendukung keberhasilan implementasi pengelolaan BMD menurut Teori Implmentasi Kebijakan Publik (Edward III, 1980) adalah fasilitas dalam bentuk pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi ini digunakan tidak hanya mengubah data menjadi informasi tapi juga digunakan untuk menyebarkan informasi kepada setiap pengguna yang dituju, informasi tersebut dapat berupa informasi keuangan maupun non keuangan. Tujuan perusahaan atau organisasi menggunakan teknologi informasi antara lain untuk mempercepat menemukan solusi, menciptakan kreativitas, efektivitas dan efesiensi dalam pekerjaan.

Yusuf (2013) menyatakan bahwa kesulitan yang dirasakan oleh pemerintah daerah dalam membuat neraca awal adalah mengumpulkan data aset dan pencatatan aset pada SKPD serta penilaian aset. Hal ini terjadi karena data aset umumnya tidak tercatat dengan baik ketika diperoleh atau ketika dilakukan pembelian maupun ketika terjadi mutasi atau perubahan-perubahan aset. Sehingga pengelolaan barang daerah yang jumlahnya sangat besar dan bervariasi ini dibutuhkan sistem informasi manajemen barang daerah. Melalui sistem ini

diharapkan pendataan barang daerah dapat dilakukan secara akurat dan *up to date*.

Penelitian tentang penggunaan teknologi informasi di pemerintahan daerah sudah dilakukan oleh Azhar, et al. (2013) menunjukkan bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset. Hasil penelitian Haryanto (2013) juga membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan aset daerah. Sedangkan Darno (2012) juga membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna. Namun demikian hasil penelitian dari (Astini, 2018) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana sistem informasi berpengaruh negatif terhadap efektivitas manajemen aset tetap.

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan BMD. Teori *stewardship* (Donaldson & Davis, 1991) menggunakan pendekatan *governance* atas dasar psikologi dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi manajemen sebagai *stewards* (pelayan) dapat termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal* dan organisasi. Pertimbangan faktor psikologi dilakukan pada saat analisis variabel kemampuan manajemen berupa motivasi pimpinan pemda dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sebagai bentuk tata kelola yang mendukung keberhasilan organisasi.

Simamora dan Halim (2012) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran adalah sumber daya manusia, bukti kepemilikan aset, penilaian aset, komitmen pimpinan. Hasil Penelitian

Belo, et all (2018) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan Barang Milik daerah dengan variabel Komitmen Pimpinan sebagai variabel moderasi dengan hasil penelitian Komitmen Pimpinan tidak mampu memoderasi kualitas aparatur daerah terhadap kualitas pengelolaan BMD tetapi Komitmen Pimpinan mampu memoderasi variabel sistem Informasi Manajemen terhadap kualitas pengelolaan BMD.

Adanya ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu terkait hubungan antara kompetensi SDM dan kualitas teknologi informasi serta untuk membuktikan peran komitmen pimpinan dalam memperkuat hubungan antar kedua variabel tersebut terhadap efektivitas pengelolaan BMD mendorong penulis untuk melakukan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan BMD?
2. Apakah Kualitas Sistem Informasi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan BMD?
3. Apakah Komitmen Pimpinan memoderasi pengaruh Kompetensi SDM terhadap Efektivitas pengelolaan BMD?
4. Apakah Komitmen Pimpinan memoderasi pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas pengelolaan BMD

5. Apakah Komitmen Pimpinan berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi SDM terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD.
3. Untuk menganalisis pengaruh Komitmen Pimpinan dalam memoderasi pengaruh Kompetensi SDM terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD.
4. Untuk menganalisis pengaruh Komitmen Pimpinan dalam memoderasi pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD.
5. Untuk menganalisis pengaruh komitmen pimpinan terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kajian ilmiah dalam ilmu ekonomi khususnya aplikasi teori stewardship dan teori implementasi kebijakan publik di sektor pemerintahan dalam hubungannya dengan penciptaan *good government governance*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait faktor yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset barang milik daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Pertanggungjawaban (*Stewardship Theory*)

Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa *Stewardship theory* menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Stewardship theory* (Donaldson & Davis, 1991) mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan, sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi

kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (manajemen) yang lebih *capable* dan siap. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah=*trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*.

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007). Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para penerima amanah (*steward*) termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pihak pemberi amanah (*principal*), selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Dengan kata lain hubungan yang terjadi antara prinsipal dan *steward* dalam hal ini rakyat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai *steward*, ialah hubungan yang terjalin karena adanya sifat dasar manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain.

Teori *stewardship* sering disebut sebagai teori pengelolaan (*penatalayanan*) dengan beberapa asumsi-asumsi dasar (*fundamental assumptions of stewardship theory*). Beberapa pertimbangan penggunaan *stewardship theory* sehubungan dengan masalah penelitian ini :

1. Manajemen sebagai *stewards* (pelayan/penerima amanah/pengelola)
Stewardship theory memandang bahwa manajemen organisasi sebagai “*stewards/penatalayanan*”, akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Penelitian ini membahas mengenai praktek pelaporan keuangan yang baik (berkualitas) termasuk pelaporan BMD. Pemerintah Daerah bertindak sebagai *stewards*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.
2. Pendekatan *governance* menggunakan sosiologi dan psikologi
Teori *stewardship* menggunakan pendekatan *governance* atas dasar psikologi dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi manajemen sebagai *stewards* (pelayan) dapat termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal* dan organisasi. Implikasinya pada penelitian ini adalah Pemda memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan hanya untuk kepentingan ekonomi tetapi juga pertimbangan sosiologis maupun psikologis masyarakat guna mencapai *good governance*. Penelitian ini mengarah ke pendekatan *governance* yaitu menghasilkan informasi laporan BMD yang berkualitas dengan mempertimbangkan faktor psikologi. Pertimbangan faktor psikologi dilakukan pada saat analisis variabel kemampuan manajemen berupa motivasi pimpinan pemda dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
3. Model Manusia, berperilaku kolektif untuk kepentingan organisasi

Model of man pada *stewardship theory* didasarkan pada *steward* (pelayan) yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok, bekerja sama dengan utilitas tinggi dan selalu bersedia untuk melayani. Terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan pro-organisational. *Steward* akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk bertindak kooperatif. Kepentingan antara *steward* dan *principal* tidak sama, tetapi *steward* tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. *Steward* berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada tindakan kooperatif dan tindakan tersebut dianggap tindakan rasional yang dapat diterima, misalnya dengan melakukan efisiensi biaya dan peningkatan kualitas/kinerja. Implikasi pada penelitian ini bahwa manajemen secara kolektif (bersama-sama) dan kooperatif mengarahkan seluruh kemampuan dan kualitasnya untuk menghasilkan informasi laporan keuangan Pemda yang berkualitas.

4. Motivasi pimpinan sejalan dengan tujuan *principals*

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi para pimpinan tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi sehingga *steward* (manajemen) bertindak sesuai keinginan *principal*. Konteks penelitian ini adalah pengelolaan BMD yang efektif, terdapat manajemen yang cenderung bersikap sesuai dengan perspektif teori pengelolaan (*stewardship theory*). Seorang aktor yang rasional yang tidak dimotivasi oleh keinginan individualnya, tetapi lebih sebagai penerima amanah

(*penatalayanan*) yang memiliki motif yang sejalan dengan tujuan *prinsipal*.

5. Kepentingan manajer-*principal* adalah konvergensi

Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa kepentingan manajer dan *principal* adalah konvergensi artinya keduanya mempunyai tujuan yang sama menuju satu titik yaitu untuk kepentingan organisasi. Kepentingan organisasi tercapai maka kepentingan individu juga terpenuhi. Penelitian ini menggunakan variabel kemampuan Sumber daya manusia dan komitmen pimpinan keduanya diasumsikan mempunyai tujuan yang sama dengan *principals* menuju satu titik yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik.

6. Struktur berupa fasilitasi dan pemberdayaan

Teori *stewardship* menggunakan struktur yang memfasilitasi dan memberdayakan. Penelitian ini menggunakan variabel Kualitas sistem informasi. Penggunaan variabel tersebut, diharapkan dapat memfasilitasi dan memberdayakan pengelolaan BMD menjadi efektif.

7. Hubungan *principals*-manajemen saling percaya

Stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Filosofis tersebut tersirat dalam hubungan fidusia antara *principals* dan manajemen. *Stewardship theory* memandang manajemen sebagai

institusi yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan *principals* maupun organisasi.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, melaksanakan pengelolaan BMD yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Edward III (1980) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau penransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor

akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

b. Sumber daya

Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

1. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
2. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
4. Fasilitas; Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III (1980) adalah:

1. Pengangkatan birokrat;
2. Insentif

d. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dalam penelitian ini, variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemementasi suatu kebijakan dalam hal pengelolaan BMD adalah variabel sumber daya baik sumber daya manusia maupun fasilitas dalam bentuk sistem informasi dan struktur birokrasi.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengertian kompetensi menurut Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural merupakan seorang pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien. Adapun menurut (Rifa'i, 2014) kompetensi merupakan kemampuan atau keahlian dalam membuat sesuatu bentuk atau pekerjaan sesuai dengan skill dan pengetahuan berdasarkan keilmuan yang dimiliki dari pendidikan formal maupun informal yang akan membentuk sikap profesional dalam bekerja. Selain itu menurut Mulyasa kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian dan mempersepsi yang mengarah pada seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. (Fauzi, 2019). Demikian dapat kita simpulkan bahwa kompetensi merupakan pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugasnya secara efektif.

Adapun pengertian dari aparatur daerah yakni pegawai negeri yang bertugas di suatu daerah tertentu. Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 1 ayat 1, adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu

jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi aparatur daerah dapat kita artikan bahwa kemampuan, keahlian serta perilaku yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri dalam suatu daerah tertentu dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Spencer dan Spencer dalam (Hutapea & Thoha, 2008) kompetensi juga dibentuk oleh beberapa komponen yakni:

1. Pengetahuan, informasi yang diketahui atau dimiliki seseorang
2. Keterampilan, kemampuan atau keahlian seseorang dalam suatu bidang
3. Konsep Diri, sikap atau nilai seorang individu.
4. Ciri Diri, karakter bawaan diri yang sifatnya konsisten.
5. Motivasi, keinginan atau dorongan dalam menjalankan tugas.

Kompetensi pengelola aset daerah dapat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah. Kompetensi seseorang akan terwujudnya melalui kinerja yang ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh (Moehariono, 2009) bahwa kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Selanjutnya melalui kinerja seorang pengelola barang milik daerah dapat kita nilai seberapa efektifnya pengelolaan barang milik daerah.

2.1.4 Kualitas Sistem Informasi

Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem yang membantu dalam pengumpulan, pengolahan, serta analisis data yang akan kemudian disajikan

dalam bentuk informasi yang bernilai dan mendukung dalam pengambilan keputusan sehingga berguna dalam fungsi operasi manajemen (Machmud, 2013).

Menurut Zuliatun dalam (Lengkey, Nangoi, & Wokas, 2019) SIMDA Keuangan dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen daerah merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh pihak pemerintah guna membantu dalam pengolahan, pengumpulan serta analisa data sehingga mendukung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi manajemen.

Adapun tujuan pengembangan aplikasi SIMDA menurut (Ole, 2014) yakni:

1. Menyediakan database tentang kondisi di daerah secara terpadu mulai dari aspek kepegawaian, aset daerah, keuangan hingga pelayanan public.
2. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan.
3. Mempersiapkan aparat daerah untuk mampu menguasai dan mendayagunakan teknologi informasi.
4. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang efektif maka aplikasi SIMDA sangatlah membantu dalam pengolahan data secara akurat, cepat dan tepat. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Alfiani dalam (Hendri & NR, 2020) bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis dengan aplikasi teknologi yang telah dikembangkan yang mendukung tercapainya akuntabilitas bagi Pemerintah Daerah baik ditingkat pelaporan SKPKD maupun ditingkat akuntansi SKPD.

2.1.5 Komitmen Pimpinan

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam manajemen. Karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu pada diri manusia, timbullah kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diamanahkan bahwa tugas dan kewenangan sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan dengan memperkuat otonomi daerah. Era Otonomi daerah ini menuntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap aparatur negara, sehingga peran kepemimpinan sangat dibutuhkan. Harus diterima bahwa peranan kepemimpinan dalam organisasi sangat sentral dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian efektifitas kepemimpinan dari seorang pemimpin merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam keberhasilan kepemimpinan tersebut. Dalam perspektif administrasi, pimpinan atau manajer merupakan orang yang bertanggung jawab atas organisasi atau unit yang dipimpinnya. Tugas manajer dapat digambarkan dalam kaitannya dengan berbagai

peran atau serangkaian perilaku yang terorganisir yang diidentifikasi dengan suatu posisi (Mitzberg dalam Herminingsih, 2009). Mitzberg menjelaskan bahwa manajer dapat memainkan tiga peran melalui kewenangan dan statusnya di dalam melaksanakan tugas - tugas yang dipercayakan antara lain:

- a. Peran interpersonal. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat memainkan peran sebagai *forehead*, *leader*, dan *liaison* (penghubung).
- b. Peran informasional. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat memainkan perannya sebagai monitor, pemberi informasi dan sebagai *spokesperson*.
- c. Peran penagambil keputusan. Peran ini, manajer digambarkan sebagai *entrepreneur*, *disturbance handle* (penangkal masalah), *resources allocator* (pengalokasi sumber daya) dan *negotiator* (negosiator).

Deskripsi peran manajer yang dikemukakan di atas, akan membutuhkan sejumlah keahlian manajerial yang penting, mengembangkan hubungan kerja seajar, menjalankan negosiasi, memotivasi bawahan, menyelesaikan konflik, membangun jaringan informasi dan membayar informasi, membuat keputusan dalam kondisi ambiguitas yang ekstrim, dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Menurut Sopiah (2008) fungsi kepemimpinan terbagi menjadi:

- a. fungsi pemecahan masalah atau fungsi yang bertalian dengan tugas yaitu mencakup fungsi pemberian saran pemecahan, informasi, dan pendapat,
- b. fungsi sosial atau fungsi pembinaan kelompok meliputi segala sesuatu yang membantu kelompok beroperasi secara lebih lancar.

Menurut Simamora dan Halim (2012), komitmen pimpinan diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut pengelolaan barang milik daerah. Hal-hal yang penting diperhatikan Kepala SKPD dalam pengelolaan barang milik daerah yang lebih baik, diantaranya adalah:

- a. Tidak sering melakukan pergantian personal pengurus dan penyimpan barang.
- b. Pengurus dan penyimpan barang harus bekerja 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan surat keputusan pengangkatan. Jika pergantian petugas pengelola barang diperlukan harus ada kaderisasi terlebih dahulu terhadap penggantinya.
- c. Kepala SKPD memberikan perhatian serius bagi barang milik daerah yang dikelolanya secara profesional.
- d. Tidak memorduakan urusan pengelolaan barang milik daerah, karena posisi kepala SKPD selain sebagai pengguna anggaran juga sebagai pengguna barang yang bertanggungjawab terhadap barang milik daerah yang dikelolanya.
- e. Kepala SKPD diperlukan bukan hanya menerima masukan tapi harus merealisasikan solusi penyelesaian masalah pengelolaan barang milik daerah.

Salah satu kriteria efektifitas kepemimpinan adalah kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan kemampuan dalam mengambil keputusan tidak terutama diukur dengan ukuran kuantitatif, dalam arti jumlah keputusan yang diambil, tetapi jumlah keputusan yang diambil yang bersifat

praktis, realistik dan dapat dilaksanakan serta memperlancar usaha pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, pimpinan juga berperan serta dalam proses pengelolaan keuangan yang lebih baik.

2.1.6 Efektivitas Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah

Berbicara tentang efektivitas menurut Miller yakni seberapa jauh sistem social mencapai tujuannya (Tangkilisan, 2005). Adapun pengertian efektivitas menurut KBBI yakni sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan. Pengertian efektivitas menurut (Ekasari, 2020) yakni berhubungan dengan keluaran (output) dan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa efektivitas berbicara mengenai segala daya usaha yang dilakukan demi tercapainya sasaran atau tujuan yang diinginkan.

Adapun pengertian dari pengelolaan yaitu suatu kegiatan yang mana memerlukan pengawasan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan biasa juga disebut dengan manajemen yang mana harus mengikuti aturan yang menjadi ketetapan agar setiap tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pengertian pengelolaan menurut (Terry, 2006) dianggap sama dengan manajemen yang mana dipahami pada kegiatan proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu dan seni demi mencapai tujuan yang dimaksud. Adapun pengertian pengelolaan atau manajemen menurut yakni proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan

dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Demikian bahwa dapat kita simpulkan pengelolaan atau manajemen memiliki pengertian yakni suatu kegiatan yang didalamnya terdapat proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan demi mencapai tujuan yang telah disepakati.

Selanjutnya pengertian dari aset barang milik daerah yakni salah satu alat penyelenggaraan roda pemerintah guna mendukung pelayanan masyarakat/*stakeholder* (Suparman & Sangadji, 2018). Adapun menurut Mardiasmo dalam (Kalangi, Kalangi, & Warongan, 2017) mengatakan bahwa, secara umum, aset pemerintah daerah adalah semua bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah dan digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian dapat kita simpulkan bahwa aset barang milik daerah yakni segala bentuk aset atau kekayaan daerah yang mendukung terselenggaranya pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2004), prinsip dasar dari keberhasilan proses pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi tiga hal utama yaitu (1) perencanaan yang tepat; (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif; dan (3) pengawasan (monitoring). Pengelolaan barang milik daerah adalah satu cara meningkatkan kinerja secara terus menerus pada setiap level perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan barang milik daerah dari suatu entitas.

Oktaviana (2010) menyatakan bahwa secara umum, pengelolaan aset pemerintah daerah mencakup 4 (empat) kegiatan utama, yaitu: 1) Perencanaan yang mencakup: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penyimpanan, penyaluran dan penggunaan, 2) Penatausahaan yang mencakup: inventarisasi, penilaian, pembukuan dan pelaporan, 3) Peningkatan produktifitas yang mencakup: pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan, 4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan keseluruhan defenisi di atas maka secara keseluruhan dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa efektivitas pengelolaan aset barang milik daerah yakni suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan terhadap kekayaan atau aset daerah dei terselenggaranya roda pemerintahan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Azhar, et al. (2013) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, dan Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset (Studi pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh) yang diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Variabel independennya terdiri dari kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi. Sedangkan variabel dependennya adalah manajemen aset. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Azhar menyatakan bahwa secara bersama–sama kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset. Sedangkan secara parsial kualitas aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap manajemen aset, sementara dua variabel bebas lainnya yaitu regulasi dan sistem informasi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen aset.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2013) yang berjudul “Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Kualitas

Pelaporan Aset Daerah”, yang dipilih sebagai variabel independennya adalah kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. sedangkan variabel dependennya adalah kualitas pelaporan aset daerah. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan aset daerah. Pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan aset daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan SKPD.

Halim (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan. Komitmen organisasi dan peranan kepemimpinan secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan.

Darno (2012) juga melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna (Studi pada Satuan Kerja Wilayah Kerja KPPN Malang). Variabel independen pada penelitian ini adalah Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, sedangkan variabel dependennya adalah Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap

kualitas laporan barang kuasa pengguna. Satuan kerja harus mengelola sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik untuk meningkatkan kualitas laporan barang kuasa pengguna.

Penelitian Simamora dan Halim (2012) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan”, menggunakan variabel independen Sumber Daya Manusia, Bukti Kepemilikan Aset, Penilaian Aset, Komitmen Pimpinan. Variabel intervening dan variabel dependen penelitiannya adalah pengelolaan aset dan kualitas laporan keuangan, seluruh faktor tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

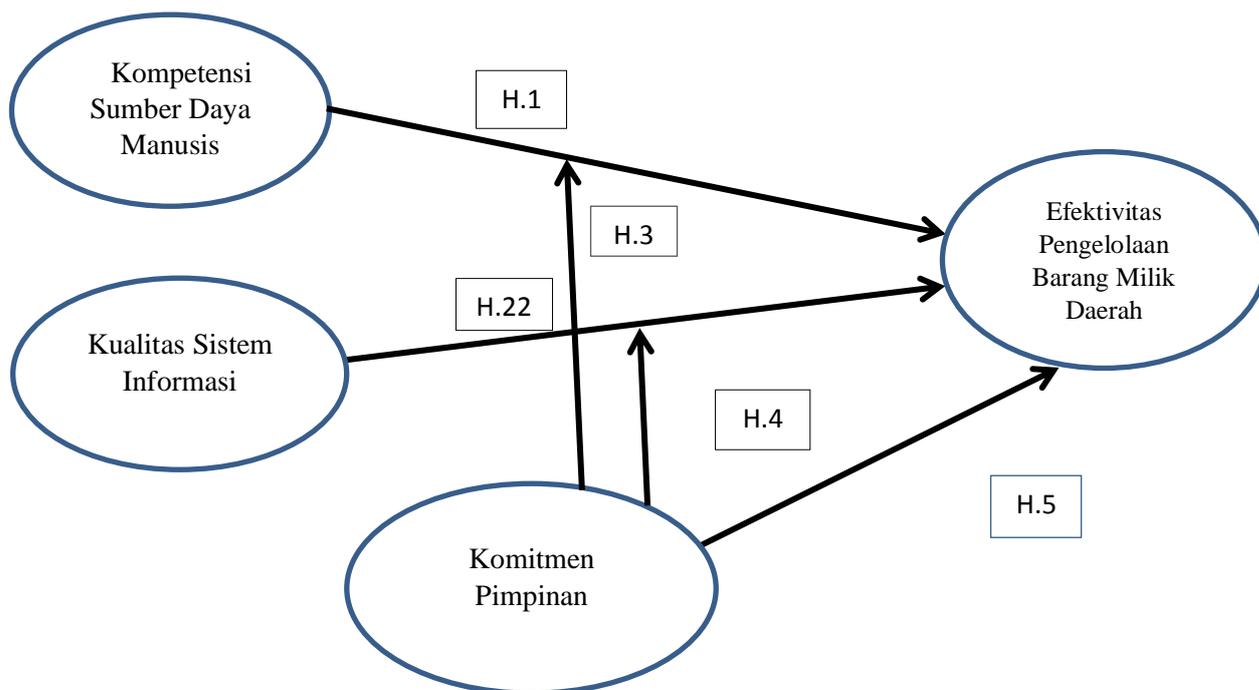
KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Efektifitas pengelolaan Barang Milik Daerah, Kualitas Sistem Informasi berpengaruh terhadap efektifitas Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Kualitas Sumber daya Manusia dengan Kualitas Sistem Informasi berpengaruh terhadap Efektifitas Pengelolaan barang Milik Daerah yang dimoderasi oleh Komitmen Pimpinan.

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991) menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Stewardship theory* (Donaldson & Davis, 1991) mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dengan Kualitas Sumber daya manusia yang baik serta kualitas sistem informasi dengan didorong oleh komitmen pimpinan maka pengelolaan Barang Milik daerah akan lebih fektif. Penentuan tujuan seseorang dipengaruhi oleh dengan motivasi seseorang dalam pencapaian kinerja yang akan dicapai. Teori implementasi kebijakan publik (Edward III, 1980) menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemementasi suatu kebijakan dalam implementasi sebuah kebijakan adalah variabel sumber daya baik sumber daya manusia maupun fasilitas dalam bentuk sistem informasi dan struktur birokrasi.

Sugiyono (2013) dalam bukunya menyatakan bahwa kerangka konsep akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel independen dengan variabel dependen. Kerangka konseptual yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilihat pada gambar



Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran

3.1. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

3.1.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Azhar, et al. (2013) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, dan Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset (Studi pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh) yang diuji

dengan menggunakan analisis regresi berganda. Variabel independennya terdiri dari kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi. Sedangkan variabel dependennya adalah manajemen aset. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Azhar menyatakan bahwa secara bersama–sama kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset. Sedangkan secara parsial kualitas aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap manajemen aset, sementara dua variabel bebas lainnya yaitu regulasi dan sistem informasi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen aset.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2013) yang berjudul “Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Kualitas Pelaporan Aset Daerah”, yang dipilih sebagai variabel independennya adalah kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. sedangkan variabel dependennya adalah kualitas pelaporan aset daerah. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan aset daerah. Pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan aset daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan SKPD.

Halim (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan. Komitmen organisasi dan peranan kepemimpinan secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan pengelolaan keuangan pada

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan.

Darno (2012) juga melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna (Studi pada Satuan Kerja Wilayah Kerja KPPN Malang). Variabel independen pada penelitian ini adalah Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, sedangkan variabel dependennya adalah Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna. Satuan kerja harus mengelola sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik untuk meningkatkan kualitas laporan barang kuasa pengguna.

Penelitian Simamora dan Halim (2012) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan”, menggunakan variabel independen Sumber Daya Manusia, Bukti Kepemilikan Aset, Penilaian Aset, Komitmen Pimpinan. Variabel intervening dan variabel dependen penelitiannya adalah pengelolaan aset dan kualitas laporan keuangan, seluruh faktor tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.1.2. Pengembangan Hipotesis

3.1.2.1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam teori implementasi kebijakan publik (Edward III, 1980) dijelaskan bahwa sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.

Kualitas aparatur daerah adalah suatu standar yang harus dicapai oleh aparatur daerah dalam hal ini pejabat/ pegawai yang terlibat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah untuk melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah secara profesional, efektif, dan efisien. Seharusnya dengan adanya aparatur yang berkualitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah maka akan menghasilkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih baik.

Haryanto (2013) memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan aset daerah. Darno (2012) juga dapat membuktikan bahwa Kemampuan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna. Satuan kerja harus mengelola sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik untuk meningkatkan kualitas laporan barang kuasa pengguna.

H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD

3.1.2.2 Pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam teori implementasi kebijakan publik (Edward III, 1980) dijelaskan bahwa Fasilitas merupakan variabel penting keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Sistem informasi adalah salah satu bentuk sarana dan prasarana yang digunakan dalam manajemen Barang Milik Daerah, yang merupakan sebuah rangkaian/ proses formal dalam pengelolaan BMD sesuai prosedur dimana data BMD dikelompokkan, diproses, dan dituangkan dalam laporan BMD. Penggunaan SIMDA-BMD seharusnya bisa meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah karena proses pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah bisa dilakukan secara komputerisasi dan terintegrasi.

Hasil penelitian Azhar, et al. (2013) menunjukkan bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset. Hasil penelitian Haryanto (2013) juga membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan aset daerah. Sedangkan Darno (2012) juga membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna

H2 : Kualitas Sistem Informasi berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD

3.1.2.3 Peranan Komitmen Pimpinan sebagai pemoderasi hubungan antara Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam manajemen. Karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu pada diri manusia, timbullah kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diamanahkan bahwa tugas dan kewenangan sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan dengan memperkuat otonomi daerah. Era Otonomi daerah ini menuntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap aparatur negara, sehingga peran kepemimpinan sangat dibutuhkan. Harus diterima bahwa peranan kepemimpinan dalam organisasi sangat sentral dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian efektifitas kepemimpinan dari seorang pemimpin merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam keberhasilan kepemimpinan tersebut.

H3 : Komitmen Pimpinan memoderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD

H4 : Komitmen Pimpinan memoderasi pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD

H5 : Komitmen Pimpinan Berpengaruh terhadap Efektivitas pengelolaan
BMD